

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KOTA TASIKMALAYA

Solahuddin

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail co Author: * sholahuddin27@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana peraturan mengenai pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat diterapkan di wilayah kelurahan Kota Tasikmalaya. Tujuan utama penelitian adalah mengevaluasi efektivitas implementasi peraturan tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan secara optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan melibatkan analisis berbagai dokumen kebijakan, peraturan, laporan, dan literatur terkait yang memberikan gambaran tentang kerangka regulasi dan konteks implementasinya. Studi lapangan mencakup observasi dan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, pemimpin kelurahan, dan anggota masyarakat setempat. Analisis data dilakukan dalam tiga langkah utama: reduksi data, display data, dan verifikasi serta penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini mengindikasikan perlunya upaya perbaikan untuk meningkatkan efektivitas implementasi peraturan di masa mendatang. Rekomendasi utama termasuk peningkatan koordinasi antar lembaga, alokasi sumber daya yang lebih baik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap program pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kota Tasikmalaya.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

PENDAHULUAN

Pembangunan sarana dan prasarana di tingkat kelurahan merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sarana mencakup fasilitas umum seperti jalan, jembatan, saluran air, dan taman, sementara prasarana meliputi infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan sistem pembuangan limbah. Pengembangan infrastruktur ini memungkinkan akses yang lebih baik terhadap layanan publik, meningkatkan mobilitas, dan mengurangi risiko bencana lingkungan. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana juga harus disertai dengan pemberdayaan masyarakat. Melalui pelatihan, penyuluhan, dan partisipasi aktif warga dalam perencanaan dan pengawasan, masyarakat akan lebih terlibat dalam menjaga dan mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang ada. Pemberdayaan masyarakat ini juga dapat mendorong munculnya inisiatif lokal untuk mengatasi masalah-masalah spesifik yang dihadapi kelurahan. Penggabungan pembangunan

infrastruktur yang baik dengan keterlibatan masyarakat yang aktif, kelurahan dapat menjadi tempat yang lebih layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 adalah regulasi yang mengatur tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di tingkat kelurahan serta upaya pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Peraturan ini ditujukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana di lingkungan kelurahan. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk memperkuat peran kelurahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan mendorong kemandirian lokal melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam peraturan tersebut, terdapat ketentuan tentang jenis kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang bisa dilakukan di kelurahan, termasuk pembangunan jalan, saluran drainase, fasilitas umum, dan berbagai infrastruktur lainnya. Selain itu, peraturan ini juga menyoroti pentingnya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan pelatihan, peningkatan keterampilan, dan berbagai program yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat di kelurahan.

Peraturan ini menegaskan bahwa pendanaan untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, peraturan tersebut memberikan panduan mengenai tata cara pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan kegiatan di tingkat kelurahan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan tepat sasaran. Tujuan akhir dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kelurahan serta menciptakan lingkungan yang lebih layak huni dan berdaya saing.

Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan, peraturan di atas mencakup beberapa aspek utama, termasuk lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, serta pendidikan dan kebudayaan. Misalnya, untuk pemukiman, pembangunan bisa mencakup infrastruktur air minum, sistem drainase, dan penerangan lingkungan. Sedangkan untuk transportasi, proyek pembangunan meliputi jalan pemukiman dan jalan poros kelurahan. Sementara kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal. Berbagai aktivitas terkait pemberdayaan mencakup pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Setelah kesepakatan dicapai, kegiatan yang disepakati harus disusun dalam dokumen perencanaan daerah dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada camat berdasarkan keputusan kepala daerah. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya tata kelola yang transparan dan partisipatif, guna memastikan bahwa kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program-program ini. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan sarana dan prasarana, serta dalam program pemberdayaan

masyarakat, bisa berdampak negatif pada keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan (Fauzi & Heryani, 2023) .

Pemerintah mengeluarkan peraturan pada umumnya bertujuan untuk mengatur berbagai hal terkait dengan pelaksanaan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan adalah upaya untuk memecahkan, mengurangi, atau mencegah suatu masalah dengan cara tertentu yaitu tindakan yang terarah (Hoogerwerf, 1992). Kebijakan dalam ruang lingkup pemerintah, merupakan pada langkah-langkah yang diambil oleh pejabat publik untuk menangani isu-isu masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, atau lingkungan. Namun demikian istilah kebijakan dapat diterapkan di organisasi non-pemerintah, sektor bisnis, atau lembaga lain untuk mengatasi tantangan internal maupun eksternal. Dengan demikian, kebijakan berfungsi sebagai alat untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas, yang memungkinkan tindakan yang terstruktur dan terkoordinasi dalam menghadapi suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu.

Edward III dan Sharkansky (Widodo, 2007) menyatakan: *"What government say and do, or not to do, it is the goals or purpose of government program"*. Kebijakan pemerintah merujuk pada serangkaian tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mengatur, mengarahkan, atau memengaruhi kehidupan masyarakat. Namun, menariknya, tidak semua kebijakan berbentuk aksi konkret atau aturan yang tertulis. Bahkan ketika pemerintah memilih untuk tidak bertindak atau menunda keputusan, hal itu juga bisa dianggap sebagai kebijakan. Kebijakan bukan hanya tentang apa yang dilakukan, tetapi juga tentang apa yang tidak dilakukan, dan keduanya memiliki implikasi terhadap kehidupan publik.

Edwards III dan Sharkansky (Suwitri, 2008) dengan menyatakan bahwa: *"Kebijakan publik adalah segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya (what government did, why they do it, and what differences it makes)"*. Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa kebijakan publik adalah lebih dari sekadar kata-kata di atas kertas. Kebijakan publik melibatkan tindakan nyata, didorong oleh alasan dan tujuan tertentu, serta memiliki dampak yang nyata pada masyarakat. Ketika membuat kebijakan publik, pemerintah harus mempertimbangkan ketiga aspek ini untuk memastikan bahwa tindakannya efektif, adil, dan menghasilkan dampak positif.

Setiap kebijakan yang telah dibuat harus dapat diimplementasikan dalam mencapai tujuannya. Jones (Kusnandar, 2012) menyatakan: *"Implementatim: we mean that activities directed toward putting a program into effect"*. Secara sederhana, istilah implementasi merupakan pelaksanaan, dan secara umum, implementasi bisa terjadi di berbagai bidang, mulai dari pengembangan perangkat lunak, manajemen proyek, strategi bisnis, hingga kebijakan publik, dan lain-lain. Meskipun setiap bidang memiliki metode implementasinya masing-masing, prinsip utamanya adalah mengambil ide atau rencana dan mengubahnya menjadi aksi nyata melalui upaya yang terorganisir dan terarah.

Agar organisasi atau pemerintah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kunci utamanya dengan mengimplementasi kebijakan secara efektif. Meskipun

biasanya suatu kebijakan dirancang dengan tujuan atau hasil tertentu, pencapaian tujuan tersebut bisa menjadi sulit atau bahkan gagal jika kebijakan tidak diimplementasikan dengan baik. Dengan implementasi yang baik, kita bisa memastikan bahwa semua elemen yang diperlukan, seperti sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur, sudah tersedia dan beroperasi sesuai rencana. Implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan kebijakan (Wahab, 2008).

Implementasi yang baik melibatkan koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan dan komunikasi yang jelas sehingga setiap pihak memahami perannya. Jika kebijakan tidak diterapkan dengan baik, bisa timbul kesenjangan antara harapan dan kenyataan, yang dapat mengarah pada ketidakpuasan masyarakat, peningkatan biaya, dan bahkan kegagalan kebijakan. Salah satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan dari implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi (Hartanto, 2021).

Keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan kompleks. Pertama, kualitas perencanaan dan desain kebijakan sangat penting; kebijakan yang dirancang dengan baik, berdasarkan data yang akurat dan analisis yang mendalam, memiliki peluang lebih besar untuk berhasil. Kedua, dukungan politik dan komitmen dari para pembuat keputusan memainkan peran kunci, karena kebijakan publik seringkali memerlukan sumber daya dan perubahan struktural yang signifikan. Selain itu, sumber daya yang memadai, baik dari segi anggaran, infrastruktur, maupun sumber daya manusia, menjadi fondasi penting bagi keberhasilan implementasi.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah serta antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan kebijakan juga sangat bergantung pada keterlibatan dan partisipasi masyarakat, karena dukungan dan umpan balik dapat memperkuat legitimasi kebijakan. Terakhir, proses monitoring dan evaluasi yang efektif diperlukan untuk menilai dampak kebijakan dan memungkinkan adanya penyesuaian atau perbaikan jika diperlukan. Semua faktor ini perlu dikelola dengan cermat untuk memastikan implementasi kebijakan publik yang sukses dan berdampak positif bagi masyarakat.

Terdapat enam variabel menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2008) yang dapat mempengaruhi terhadap kinerja implementasi kebijakan publik, di antaranya:

1. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik antara organisasi dan pelaksana adalah kunci untuk implementasi kebijakan publik yang sukses. Kinerja implementasi sering tergantung pada seberapa baik pihak-pihak yang terlibat dapat saling berkomunikasi dan mengoordinasikan tindakannya untuk mencapai tujuan bersama.

2. Sumber Daya

Agar kebijakan publik berhasil diimplementasikan, diperlukan sumber daya yang memadai dan tepat guna. Sumber daya ini terdiri dari tenaga kerja yang berkualitas, serta dana dan waktu yang cukup. Tenaga kerja yang kompeten

dengan keterampilan yang sesuai adalah kunci untuk memastikan kebijakan dijalankan secara efektif dan efisien.

3. Sikap/Kecenderungan (disposisi) para Pelaksana

Sikap dan kecenderungan para pelaksana kebijakan memengaruhi seberapa baik kebijakan itu diterapkan. Jika pelaksana memiliki disposisi positif dan selaras dengan tujuan kebijakan, yang akan lebih cenderung menjalankan tugas dengan baik. Sebaliknya, sikap negatif atau kurangnya dukungan dapat menghambat proses implementasi.

4. Struktur Birokrasi (Karakteristik Agen Pelaksana)

Struktur birokrasi dan karakteristik agen pelaksana juga memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Agen pelaksana dengan karakteristik yang tepat, seperti ketegasan atau fleksibilitas yang sesuai, dapat mempengaruhi hasil implementasi. Misalnya, untuk kebijakan yang membutuhkan perubahan radikal, agen pelaksana dengan sifat yang tegas dan disiplin mungkin lebih efektif.

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Faktor lingkungan eksternal seperti ekonomi, sosial, dan politik juga berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan yang kondusif dapat mendukung penerapan kebijakan, sementara lingkungan yang tidak stabil atau bermasalah dapat menghambat proses tersebut. Oleh karena itu, memahami dan mengatasi faktor-faktor lingkungan eksternal menjadi penting untuk implementasi yang sukses.

Penelitian dan analisis terhadap implementasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Tasikmalaya sangat penting untuk beberapa alasan. Pertama, penelitian membantu mengidentifikasi masalah dan hambatan dalam penerapan kebijakan, sehingga memungkinkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mempengaruhi efektivitasnya. Kedua, data empiris yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk menilai dampak nyata kebijakan terhadap masyarakat, seperti peningkatan kualitas hidup dan aksesibilitas. Ketiga, penelitian dapat mengungkap kebutuhan masyarakat yang mungkin belum terakomodasi oleh kebijakan saat ini, sehingga pemerintah dapat menyesuaikan strateginya untuk memastikan kebijakan relevan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, penelitian memberikan kesempatan untuk menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, yang penting untuk mendorong rasa memiliki dan memastikan kebijakan mencerminkan aspirasi warga. Terakhir, penelitian mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, menyediakan dasar yang kuat bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan langkah yang lebih transparan, akuntabel, dan inovatif. Dengan demikian, penelitian dan analisis yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Tasikmalaya mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.

METODE

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan di Kota Tasikmalaya dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, informan terdiri dari pejabat Pemerintah Kota Tasikmalaya dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Data dikumpulkan melalui dua metode utama: studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan melibatkan penelaahan terhadap dokumen-dokumen terkait, sementara studi lapangan dilakukan melalui observasi langsung di lokasi serta wawancara mendalam dengan para informan.

Untuk menganalisis data, peneliti melakukan proses reduksi data untuk menyederhanakan dan memilih informasi yang relevan, kemudian menyajikannya dalam bentuk tampilan data yang terorganisir. Langkah selanjutnya adalah verifikasi untuk memastikan keakuratan data, diikuti dengan penarikan kesimpulan untuk merumuskan hasil penelitian. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang mendalam tentang pelaksanaan kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat di kelurahan setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 untuk memperkuat pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta memberdayakan masyarakat di tingkat lokal. Sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan sosial di wilayah Jawa Barat, Kota Tasikmalaya mengakui pentingnya pengembangan infrastruktur dasar dan program pemberdayaan masyarakat yang efektif untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Dengan adanya peraturan ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana kelurahan yang memadai. Upaya ini mencakup pembangunan atau renovasi fasilitas publik seperti jalan lingkungan, drainase, taman, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Selain itu, pemerintah kota juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan melalui penyediaan peralatan dan fasilitas yang mendukung.

Program pemberdayaan masyarakat di Kota Tasikmalaya dirancang untuk meningkatkan partisipasi aktif warga dalam pembangunan lokal. Melalui inisiatif ini, pemerintah mendorong berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil dan menengah, serta kegiatan sosial yang memperkuat ikatan komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan komunitas yang lebih mandiri, inovatif, dan mampu bersaing dalam ekonomi lokal. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, Pemerintah Kota Tasikmalaya berharap dapat mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, di mana sarana dan prasarana yang baik serta pemberdayaan masyarakat menjadi fondasi utama. Inisiatif ini juga diharapkan

dapat meningkatkan kualitas hidup warga Kota Tasikmalaya, sambil menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Top of Form

Berdasarkan hasil penelitian ini mengungkapkan implementasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di Kota Tasikmalaya telah berhasil dengan baik, menandakan tujuan utama kebijakan ini sudah tercapai. Kelurahan-kelurahan di Kota Tasikmalaya mampu menjalankan kebijakan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, memperkuat lembaga masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Komunikasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Komunikasi yang efektif memungkinkan pelaksana kebijakan dan masyarakat saling bertukar informasi, sehingga mempermudah koordinasi dan penerapan kebijakan di lapangan. Sumber daya manusia yang cukup dan kemampuan para pelaksana untuk memotivasi partisipasi masyarakat juga berkontribusi pada keberhasilan ini, dengan adanya dukungan nyata dari masyarakat baik dalam bentuk tenaga kerja maupun konsumsi di lapangan.

Sikap pelaksana juga memainkan peran kunci dalam implementasi kebijakan ini. Para pelaksana menunjukkan komitmen dan tindakan nyata dalam bentuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), proposal kegiatan, pelaksanaan proyek, dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan. Dengan demikian, sikap positif dan proaktif dari pelaksana berkontribusi pada keberhasilan implementasi kebijakan.

Struktur birokrasi yang jelas dan efektif juga berperan dalam keberhasilan ini. Pembentukan kelompok masyarakat sebagai pelaksana kebijakan di setiap kelurahan sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 40 Tahun 2022 memberikan kerangka kerja yang terorganisir untuk melaksanakan kebijakan ini. Faktor lingkungan juga turut mendukung implementasi, dengan kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan lembaga lainnya yang mendukung pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Terakhir, kesesuaian antara ukuran dan tujuan kebijakan dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat di setiap kelurahan memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya diterapkan secara prosedural, tetapi juga relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan lokal. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sesuai dengan RKA dan Perwal yang berlaku, serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai faktor yang mendukung implementasi kebijakan saling bersinergi untuk memastikan keberhasilan program pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kota Tasikmalaya.

KESIMPULAN

Penerapan kebijakan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Kota Tasikmalaya telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Indikator

keberhasilan dapat dilihat dari rangkaian proses mulai dari tahap perencanaan, perumusan rencana kegiatan dan anggaran, hingga pelaksanaan serta pelaporan yang berjalan secara efektif. Kebijakan ini telah mencapai hasil optimal dengan fokus pada beberapa aspek kunci, di antaranya peningkatan peran dan efektivitas Kelurahan dan Kecamatan dalam pelayanan masyarakat, peningkatan partisipasi dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, percepatan pemerataan pembangunan melalui pendekatan partisipatif, inovasi dalam tata kelola pemerintahan, dan penguatan kualitas pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Fauzi, A., & Heryani, A. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PURBARATU KOTA TASIKMALAYA. *JAK PUBLIK*, 4. <https://administrasiku.com/index.php/jakp/article/view/88>
- Hartanto, B. (2021). FAKTOR KOMUNIKASI DALAM MENCAPAI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (Studi tentang Pemekaran Kelurahan di Kota Tasikmalaya. *JAK PUBLIK*, 2. <https://administrasiku.com/index.php/jakp/article/view/54>
- Hoogerwerf. (1992). *Ilmu Pemerintahan* (Tobing (ed.)). Erlangga.
- Kusnandar, I. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Multazam.
- Suwitri, S. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Analisis Kebijakan Publik*.
- Wahab, A. S. (2008). *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses. Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.